



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA  
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK**

ALAMAT : P.O. BOX I Sekotong Barat, Ds. Gili Genting Sekotong Barat, Kabupaten Lombok Barat  
Propinsi Nusa Tenggara Barat. Fax : (0370) 6182034

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK  
NOMOR :1641/BPBL-L/RC.220/IX/2020**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS  
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK  
TAHUN 2020-2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK**

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024 serta Keputusan Dirjen Perikanan Budidaya Nomor.272/KEP-DJPB/2020 tanggal 30 Juli 2020 tentang Rencana Strategis Tahun 2020-2024, maka perlu ditetapkan Rencana Strategis Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok Tahun 2020-2024;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/lembaga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4406);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1)
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Tawar, Perikanan Budidaya Air Payau dan Perikanan Budidaya Laut;

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia nomor 220 tahun 2017).
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 699).

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK TAHUN 2020-2024
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok.
- KEDUA : Rencana Strategis Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam :
- a. Penyusunan penetapan kinerja, rencana kinerja tahunan, dan rencana kerja anggaran untuk setiap unit kerja lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok;
  - b. Penyusunan rencana program Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok
  - c. Koordinasi Perencanaan program antar divisi lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok;
  - d. Pengendalian program dan kegiatan lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok;
  - e. Penyusunan Laporan Tahunan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
- KETIGA : Rencana Strategis Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok ini.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Lombok Barat

Pada tanggal : 4 September 2020

Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok



Mulyanto, S.T, M.Si

Lampiran : Keputusan Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok  
Nomor 1641/BPBL-L/RC.220/IX/2020 tentang  
Rencana Strategis Balai Perikanan Budidaya Laut  
Lombok Tahun 2020-2024

# **RENCANA STRATEGIS BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK TAHUN 2020-2024**



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA**

## KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Permen KP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024, serta Keputusan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 272 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2020-2024.

Sebagai dokumen perencanaan lima tahunan, Renstra Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok membahas antara lain : (i) reviu kondisi umum, potensi, dan permasalahan perikanan budidaya di lingkup BPBL Lombok; (ii) visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis pembangunan perikanan budidaya 2020-2024; (iii) arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan pembangunan perikanan budidaya 2020-2024; dan (iv) target kinerja perikanan budidaya 2020-2024 meliputi aspek produksi, aspek kesejahteraan, dan aspek pengembangan kawasan, serta rancangan kerangka pendanaannya.

Harapan kami kiranya dokumen ini dapat dijadikan bahan perencanaan, evaluasi dan *feed back* terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok 5 tahun ke depan serta dapat dipergunakan sebagai bahan masukan bagi pemangku kepentingan perikanan budidaya. Disadari bahwa dokumen ini masih banyak kekurangannya, maka diharapkan masukan/saran yang bersifat membangun.

Lombok Barat, 4 September 2020

Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok



Mulyanto, ST., M.Si

# DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	v
<b>1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Kondisi Umum .....	2
A. Pengembangan Komoditas Budidaya Laut .....	2
B. Kegiatan Strategis yang Telah Dilakukan pada Tahun 2015-2019 ...	3
1.3 Potensi dan Permasalahan .....	4
A. Potensi .....	4
B. Permasalahan .....	7
1.4 Lingkungan Strategis.....	8
<b>2. VISI, MISI, DAN SASARAN STRATEGIS .....</b>	<b>12</b>
2.1 Visi .....	12
2.2 Misi .....	12
2.3 Tujuan .....	13
2.4 Sasaran Strategis .....	13
<b>3. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN .....</b>	<b>15</b>
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi DJPB .....	15
3.2 Strategi .....	16
3.3 Kerangka Regulasi .....	18
3.4 Kerangka Kelembagaan .....	19
<b>4. INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .....</b>	<b>23</b>
4.1 Target Kinerja .....	23
4.2 Kerangka Pendanaan .....	25
<b>5. PENUTUP .....</b>	<b>26</b>

# DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Indikator Kinerja BPBL Lombok Tahun 2020-2024.....	23
---	----

# DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Potensi, Permasalahan, Peluang, dan Tantangan Perikanan Budidaya .....	11
Gambar 2. Struktur Organisasi DJPB.....	20
Gambar 3. Struktur Organisasi BPBL Lombok.....	22

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 LATAR BELAKANG**

Tahap terpenting dalam RPJM 2005-2025 adalah periode tahun 2020-2024 karena merupakan tahap terakhir sehingga akan mempengaruhi pencapaian target akhir RPJPN 2005-2025 yaitu mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara –negara berpenghasilan menengah keatas (upper-middle income country) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas SDM, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Indonesia mempunyai potensi sumber daya alam kelautan dan perikanan yang sangat besar. Peran penting kelautan dan perikanan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020. RPJMN ini berpedoman pada Visi Presiden yaitu terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, selanjutnya dalam mewujudkan visi ini ditetapkan Nawacita Kedua yang merupakan misi presiden.

Perikanan budidaya diharapkan mampu memberikan dampak peningkatan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan (terutama pembudidaya ikan), mewujudkan ketahanan dan keamanan pangan, keberlanjutan lingkungan serta berkontribusi dalam peningkatan PDB Nasional. Oleh karena itu penjabaran pelaksanaan pembangunan perikanan budidaya, lebih lanjut dituangkan dalam Rencana Strategi (RENSTRA) Perikanan Budidaya 2020-2024 secara nasional. Selanjutnya Renstra DJPB harus mampu diterjemahkan oleh unit pelaksana teknis lingkup DJPB termasuk oleh Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok yang dituangkan dalam Rencana Strategi BPBL Lombok 2020-2024 karena Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (BPBL Lombok) merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bidang budidaya laut yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

BPBL Lombok mempunyai wilayah kerja pendampingan teknis meliputi tiga provinsi yakni Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bali dan Nusa Tenggara Timur. Luasnya cakupan wilayah kerja ini dan kompleksitas permasalahan seputar budidaya laut dengan semua dinamikanya baik dinamika internal maupun eksternal dalam skala local, regional, nasional maupun global telah memacu BPBL Lombok-sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya- untuk berbenah diri dengan meningkatkan kinerja yang diamanahkan secara maksimal dan optimal serta efektif dan efisien untuk mencapai sasaran strategis dan

indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan perikanan budidaya di Wilayah kerja Prov. Bali, Prov. NTB dan Provinsi NTT diperlukan Rencana Strategis (Renstra) Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok 2020- 2024 yang mengacu pada Restra DJPB. Renstra ini merupakan dokumen yang menjabarkan kegiatan pemanfaatan potensi budidaya laut untuk meningkatkan perekonomian para pembudidaya ikan dan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah kerja. Dokumen Resntra akan menjadi acuan kegiatan BPBL Lombok 5 tahun kedepan bagi stakeholder terkait. Restra kemudian dijabarkan dalam dokumen perencanaan tahunan, seperti Rencana kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA-KL).

## 1.2 KONDISI UMUM

### A. Pengembangan Komoditas Budidaya Laut

BPBL Lombok saat ini terus fokus pada pengembangan komoditas budidaya laut yang menjadi unggulan. Ada 5 (lima) komoditas yang dikembangkan BPBL Lombok yakni : (1) Ikan bersirip (Finfish) seperti Bawal Bintang (*Trachinotus Blochii*) dan Kakap putih (*Lates Calcarifer*) ; (2) Abalone (*Haliotis asinina*, *Haliotis squamata*, dan *Hybrid Haliotis Ninamata*) ; (3) Tiram Mutiara (*Pinctada maxima*) ; (4) Rumput Laut (*Kappaphyeus alvarezii*) kultur jaringan ; (5) ikan hias (Clown Fish) ;

Untuk mendukung kegiatan produksi komoditas-komoditas tersebut, BPBL Lombok dilengkapi dengan prasarana dan sarana serta fasilitas di 2 (dua) lokasi baik di Sekotong Lombok Barat maupun di Gerupuk Lombok Tengah. Kegiatan pengembangan Budidaya Perikanan Laut yang dilakukan di Sekotong Lombok Barat adalah (1) Pengelolaan Induk/Calon Induk dan produksi benih Bawal Bintang, Kakap putih dan ikan hias; (2) Pengelolaan Induk/Calon Induk dan produksi benih kekerangan : Tiram mutiara dan abalone; (3) Laboratorium Kultur jaringan rumput laut ; (4) Produksi pakan alami skala laboratorium dan massal; dan (5) Pengujian Laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan.

Adapun kegiatan pengembangan Budidaya Perikanan Laut yang dilakukan di Gerupuk Lombok Tengah adalah (1) Perbanyak bibit rumput laut hasil kultur Jaringan; (2) Pembenuhan dan Pendederan Bawal Bintang dan Kakap Putih (3) Pembenuhan dan Pendederan Tiram Mutiara dan (4) Produksi Pakan Alami

## **B. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2014 - 2019**

1. Produksi benih ikan laut tahun 2015-2019 terus meningkat dengan kenaikan rata-rata tiap tahun mencapai 20 % . Pada tahun 2015 produksi benih ikan laut di BPBL Lombok sebanyak 452.005 ekor (terdiri dari benih ikan bawal bintang, kakap putih, ikan hias, abalone dan tiram mutiara ), sedangkan pada tahun 2019 naik mencapai 1.058.650 ekor yang terdiri dari benih finfish (bawal bintang, kerapu dan kakap putih) sebanyak 778.500 ekor, ikan hias (laut) sebanyak 2.950 ekor, abalon sebanyak 18.200 ekor dan tiram mutiara sebanyak 259.000 ekor. Mulai tahun 2016 BPBL Lombok memberikan bantuan benih ke masyarakat dan terus meningkat jumlahnya setiap tahunnya pada tahun 2016 sebanyak 160.000 ekor dan pada tahun 2019 sebanyak 771 .000 ekor terdiri benih bawal bintang, kakap putih, dan tiram mutiara.
2. Produksi Calon Induk Unggul 2015-2019 setiap tahunnya 3800-4125 ekor yang digunakan sebagai perbaikan kualitas induk yang digunakan untuk produksi benih bermutu.
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang di bebaskan setiap tahunnya berkisar 478.000.000-728.000 dari hasil produksi benih dan seleksi produksi calon induk.
4. Kegiatan perekayasa bidang budidaya laut di BPBL Lombok selama periode 2015-2019 telah menghasilkan paket teknologi budidaya laut meliputi komoditas budidaya yang dikembangkan di BPBL Lombok meliputi kegaitan pembenihan, pendederan ikan bawal bintang, kerapu dan kakap putih serta pembesaran ikan di keramba jaring apung (KJA), pembenihan dan pendederan abalon, pembenihan dan pendederan tiram mutiara, pembenihan dan pendederan ikan hias clown fish, pembibitan aklimatisai dan kebun bibit rumput laut kultur jaringan, kegaitan pakan alami.
5. Kegiatan pengawasan pembudidaya ikan di wilayah kerja pengawasan pembudidayaan ikan BPBL Lombok meliputi Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Bali. Kegiatan pengawasan pembudidayaan ikan tersebut meliputi kegiatan pembinaan masyarakat melalui pengawasan dan pemberdayaan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB). Disamping itu juga dilakukan pendampingan terhadap unit-unit pembenihan ikan yang ada di wilayah kerja baik milik pemda provinsi/kabupaten/kota maupun UPR terkait Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB). Selaian pengawasan CBIB dan CPIB, kegiatan mengawasan oleh BPBL Lombok juga meliputi kegiatan Pengawasan Usaha Pembudidaya Ikan yang

diberdayakan di kawasan budidaya/minapolitan/industrialisasi perikanan. Kawasan budidaya/minapolitan/industrialisasi perikanan di Provinsi Bali dengan komoditas rumput laut), di Provinsi NTB meliputi Sumbawa, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa Barat dengan komoditas udang vanamae dan rumput laut) dan di Provinsi NTT dengan komoditas udang vanamae dan rumput laut).

6. Kegiatan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan meliputi (1) pengujian sampel dengan sejumlah parameter yakni kualitas air, bakteriologi, Virus (VNN, Iridovirus, Vibrio, IMNV, WSSV, IHNV dan TSV), parasit, residu dan histologi. (2) monitoring daerah sebaran dan perkembangan penyakit ikan. (3) Sistem Manajemen Mutu (Akreditasi SNI ISO/IEC 17025:2008). (4) Kalibrasi Peralatan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan. (5). Uji Banding. (6) Temu Lapang dan Pengujian Penyakit Ikan dan (7) menggalang koordinasi dan membentuk Jejaring Lab Kesehatan dan Ikan Nasional.

### 1.3 POTENSI DAN PERMASALAHAN

#### A. Potensi

##### a). Ketersediaan Lahan Perikanan Budidaya

Ketersediaan lahan pengembangan perikanan budidaya meliputi: (a) budidaya laut, (b) budidaya air payau, (c) budidaya air tawar. Luas lahan potensial untuk budidaya ikan tercatat sekitar 12 juta hektar dengan rincian: 8,4 juta hektar untuk budidaya laut; 1,2 juta hektar untuk budidaya air payau, dan 2,2 juta hektar untuk budidaya air tawar.

Berdasarkan hasil kajian Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2004, Indonesia diperkirakan memiliki potensi indikatif sebesar 8,4 juta ha perairan laut, dimana 3,8 juta ha merupakan potensi efektif yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan kawasan perikanan budidaya laut. Terdiri dari 775 ribu ha untuk pengembangan KJA ikan/lobster/abalone, 37,2 ribu ha untuk pengembangan karamba tancap ikan, 769,5 ribu ha untuk pengembangan budidaya rumput laut, 4,7 juta ha untuk pengembangan budidaya kekerangan, 174,6 ribu ha untuk pengembangan budidaya teripang dan 1,9 juta ha untuk pengembangan budidaya tiram mutiara.

Potensi lahan budidaya air tawar terdiri dari lahan budidaya kolam, sawah (mina padi) dan di perairan umum yang terdiri dari danau, rawa dan sungai. Untuk potensi lahan budidaya di kolam, dihitung berdasarkan asumsi luas

lahan yang mendapat pasokan air irigasi teknis sebagai sumber airnya. Dengan memanfaatkan potensi sekitar 20% pasok air irigasi tersebut, diperkirakan luas potensi lahan untuk budidaya di kolam adalah sebesar 528.700 ha. Berdasarkan kajian Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2003, potensi lahan untuk pengembangan budidaya di kolam yang terluas adalah di pulau Jawa, yaitu propinsi Jawa Timur 92.400 ha, diikuti Jawa Barat 86.700 ha dan Jawa Tengah 83.200 ha. Di wilayah Sumatera, potensi lahan budidaya tawar yang terluas adalah NAD 29.000 ha, Sumatera Utara 31.800 ha dan Sumatera Barat 24.300 ha. Di Indonesia bagian Timur, potensi lahan untuk kolam yang terbesar adalah Sulawesi Selatan 34.800 ha.

Potensi lahan budidaya ikan di perairan umum, meliputi budidaya di danau, rawa dan sungai. Budidaya perikanan di perairan umum harus dilakukan secara ramah lingkungan, produktif, serta sesuai dengan penggunaan perairan umum untuk keperluan lainnya. Sedangkan potensi lahan budidaya di sawah atau lebih dikenal dengan sebutan budidaya mina padi, masih sangat besar dan belum sepenuhnya dimanfaatkan. Diperkirakan di seluruh Indonesia terdapat potensi sawah untuk pengembangan budidaya minapadi sekitar 1,5 juta ha.

#### 1. Tenaga Kerja Perikanan Budidaya

Jumlah penduduk yang sebagian besar tinggal di daerah pedesaan merupakan potensi tenaga kerja perikanan budidaya, terlebih lagi penduduk yang tinggal di daerah pesisir. Sampai pada tahun 2014 terdapat lebih dari 4 juta orang menggantungkan hidup pada kegiatan perikanan budidaya. Jumlah tenaga kerja tersebut diprediksi akan terus bertambah seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan angkatan kerja.

Apabila jumlah penduduk yang besar dapat ditingkatkan pengetahuannya mengenai perikanan budidaya, maka ini dapat secara langsung menunjang peningkatan produksi perikanan budidaya. Selain itu, peningkatan jumlah lulusan perguruan tinggi perikanan menunjukkan bahwa potensi tenaga kerja terdidik di bidang perikanan budidaya akan semakin tinggi.

#### 2. Teknologi Perikanan Budidaya

Banyak paket teknologi penelitian dan perekayasa di bidang perikanan budidaya yang dapat dimanfaatkan oleh pembudidaya ikan untuk meningkatkan kuantitas, kualitas, dan produktivitas perikanan budidaya

secara efisien. Berbagai spesies ikan komersial sudah berhasil di budidayakan seperti kerapu, kakap, ikan hias. Program *broodstock center* perikanan budidaya telah menghasilkan induk varietas unggul berbagai spesies dan benih berkualitas tinggi. Keberhasilan dalam produksi vaksin, probiotik dan *immunostimulan* untuk ikan/udang, diterbitkannya Standar Nasional Indonesia bidang perikanan budidaya, serta tersebarnya laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan utamanya untuk deteksi dini penyakit ikan yang dimiliki oleh pemerintah, swasta, maupun perguruan tinggi menambah optimis usaha di bidang perikanan budidaya akan terus tumbuh.

### 3. Potensi Pertumbuhan Penduduk, Daya Beli dan Permintaan Pasar

Menurut publikasi Badan Pusat Statistik pada bulan Agustus 2010, jumlah penduduk Indonesia berdasarkan hasil sensus adalah sebanyak 237,56 juta orang, dengan laju pertumbuhan penduduk sebanyak 1,49 persen per tahun. Jumlah penduduk yang sangat besar merupakan pasar dalam negeri yang potensial bagi produk perikanan khususnya perikanan budidaya. Pencapaian keberhasilan pembangunan ekonomi akan berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita masyarakat yang akan berimplikasi pada peningkatan daya beli dan konsumsi masyarakat, termasuk komoditas perikanan.

Masih rendahnya konsumsi masyarakat akan produk perikanan membuka peluang bagi peningkatan volume produksi dan diversifikasi produk perikanan di Indonesia. Namun hal tersebut harus diikuti dengan upaya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya makan ikan serta menjamin kualitas produk perikanan yang aman dikonsumsi sesuai dengan permintaan pasar.

Produk perikanan Indonesia juga berpeluang untuk dipasarkan ke pasar internasional seiring dengan pemberlakuan pasar bebas di era globalisasi. Terbukanya pasar luar negeri harus disertai dengan upaya pemenuhan persyaratan negara pengimpor terutama terkait dengan keamanan pangan. Perikanan Budidaya terus dibangun dan dikembangkan dengan pola pikir industrialisasi, guna meningkatkan daya saing serta nilai tambah dalam menghadapi era pasar global, serta tuntutan pengelolaan sumberdaya perikanan yang lebih bertanggung jawab.

## B. Permasalahan

Pembangunan perikanan budidaya masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, diantaranya:

### 1. Pengelolaan kawasan dan kesehatan ikan:

- a. Konflik kepentingan pemanfaatan tata ruang lahan dan air dikarenakan kawasan perikanan budidaya seringkali tidak dilindungi pemanfaatannya dengan peraturan tata ruang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (baik RZWP-3-Katau RTRW), sehingga banyak lahan budidaya ikan yang dimanfaatkan tidak sesuai peruntukannya;
- b. Belum optimalnya penerapan biosecurity, penanganan penyakit ikan, penggunaan vaksin dan pengendalian lingkungan
- c. Kualitas dan kuantitas laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan yang belum memadai;
- d. Infrastruktur perikanan budidaya belum memadai, seperti saluran irigasi (primer, sekunder, tersier), jalan produksi, dan wadah budidaya (kolam, KJA, tambak).

### 2. Pengelolaan perbenihan ikan:

- a. Belum terbangunnya sistem logistik perbenihan yang menyebabkan distribusi induk dan benih belum sesuai dengan kebutuhan setiap daerah;
- b. Belum optimalnya penerapan teknologi pembenihan yang dapat memproduksi benih dengan kualitas dan kuantitas tinggi serta ramah lingkungan;
- c. Belum banyak tersedia benih ikan lokal bernilai ekonomis tinggi yang diproduksi dari unit pembenihan;

### 3. Pengelolaan pakan dan obat ikan:

- a. Ketergantungan yang tinggi terhadap bahan baku pakan impor yang menyebabkan harga pakan mahal di tingkat pembudidaya;
- b. Pembudidaya ikan masih bergantung pada pakan pabrikan karena pembudidaya belum dapat memproduksi pakan secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan sendiri;

- c. Kurangnya pemanfaatan dan penyediaan pakan alami sebagai alternatif pakan buatan;
  - d. Masih banyaknya obat ikan tidak berizin yang beredar serta masih lemahnya pengawasan peredaran obat.
4. Pengelolaan produksi dan usaha:
- a. Akses permodalan dan perlindungan usaha budidaya skala kecil masih terbatas;
  - b. Kurangnya sosialisasi informasi terkait prosedur, komoditas, dan lokasi investasi perikanan budidaya;
  - c. Kurangnya harmonisasi regulasi perizinan dan pengawasan di sentra kawasan budidaya;
  - d. Asuransi mandiri perikanan budidaya belum berkembang.
5. Sumber daya manusia dan kelembagaan:
- a. Kompetensi SDM pembudidaya skala kecil / menengah belum siap untuk adaptif terhadap peningkatan teknologi;
  - b. Kurangnya kompetensi SDM bagi Aparatur Sistem Negara;
  - c. Kelembagaan pembudidaya ikan belum terkelola dengan baik dan belumberorientasi pasar;
  - d. Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Perikanan Budidaya belummenjangkau seluruh wilayah Indonesia;
  - e. Kelembagaan organisasi pemerintah di daerah belum secara komprehensifmencakup semua aspek pengelolaan perikanan budidaya.
6. Penerapan standarisasi dan sertifikasi perikanan budidaya:
- a. Pelaksanaan sistem standarisasi belum sinkron dengan kebutuhan pembudidaya dan kebutuhan pasar;
  - b. Belum dirasakan adanya insentif dari sertifikasi CBIB sehingga kesadaran untuk menerapkan persyaratan CBIB belum merata;
  - c. Unit pembenihan yang bersertifikat CPIB masih terbatas;
  - d. Masih terbatasnya unit produksi pakan yang bersertifikat CPPIB terutama unit produksi pakan mandiri;
  - e. Digitalisasi untuk usaha perikanan budidaya belum optimal.
7. Regulasi tata kelola perikanan budidaya masih belum sepenuhnya optimal untuk

mengakselerasi pembangunan perikanan budidaya di pusat dan di daerah.

8. Pendataan perikanan budidaya belum sepenuhnya menjangkau semua sentra budidaya sehubungan dengan masih terbatasnya jumlah dan sebaran enumerator serta sistem pendataan dalam tahap transisi dengan pola satu data.

#### 1.4 LINGKUNGAN STRATEGIS

Lingkungan strategis yang dapat memberikan peluang bagi Indonesia untuk membangun sektor perikanan budidaya sebagaimana yang teruang dalam Renstra DJPB 2020-2024 antara lain:

1. Posisi geografis Indonesia sangat strategis karena terletak antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia dan juga antara dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Lokasi ini sangat menguntungkan karena menjadi titik persimpangan jalur perdagangan internasional baik dari laut dan udara yang membuat Indonesia menjadi negara yang berpotensi perekonomiannya baik.
2. Pertumbuhan populasi penduduk yang diperkirakan mengalami peningkatan sebesar 1,02% per tahun pada periode 2020-2024 atau meningkat dari 271,06 juta orang pada tahun 2020 menjadi 282,24 juta orang pada tahun 2024 (BPS, Bappenas, UN Population Fund 2013) akan berimplikasi pada peningkatan kebutuhan ikan, dari 12,18 juta ton pada tahun 2020 menjadi 13,7 juta ton (KKP 2019). Dalam hal ini, perikanan budidaya merupakan salah satu sektor yang paling mungkin untuk ditingkatkan produksinya untuk memenuhi kebutuhan ikan tersebut, mengingat produksi perikanan tangkap yang cenderung mengalami stagnasi.
3. Pasar bebas (*free trade*). Dampak dari globalisasi dalam kerangka perdagangan internasional adalah mendorong peningkatan arus lalu lintas dan menurunnya secara bertahap hambatan tarif (*tariff barriers*) dalam perdagangan hasil perikanan antar negara. Keadaan ini memicu Indonesia untuk semakin meningkatkan persyaratan jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan agar produknya dapat diterima oleh pasar internasional.
4. Preferensi masyarakat domestik dan global telah mengalami pergeseran dari konsumsi daging merah menjadi daging putih/ikan. Hal ini mendorong peningkatan permintaan bagi produk perikanan budidaya (DJPB 2017).
5. Perubahan pola tata niaga perikanan budidaya dengan digitalisasi. Era globalisasi dan transformasi industri 4.0 memberikan peluang bagi bisnis perikanan budidaya

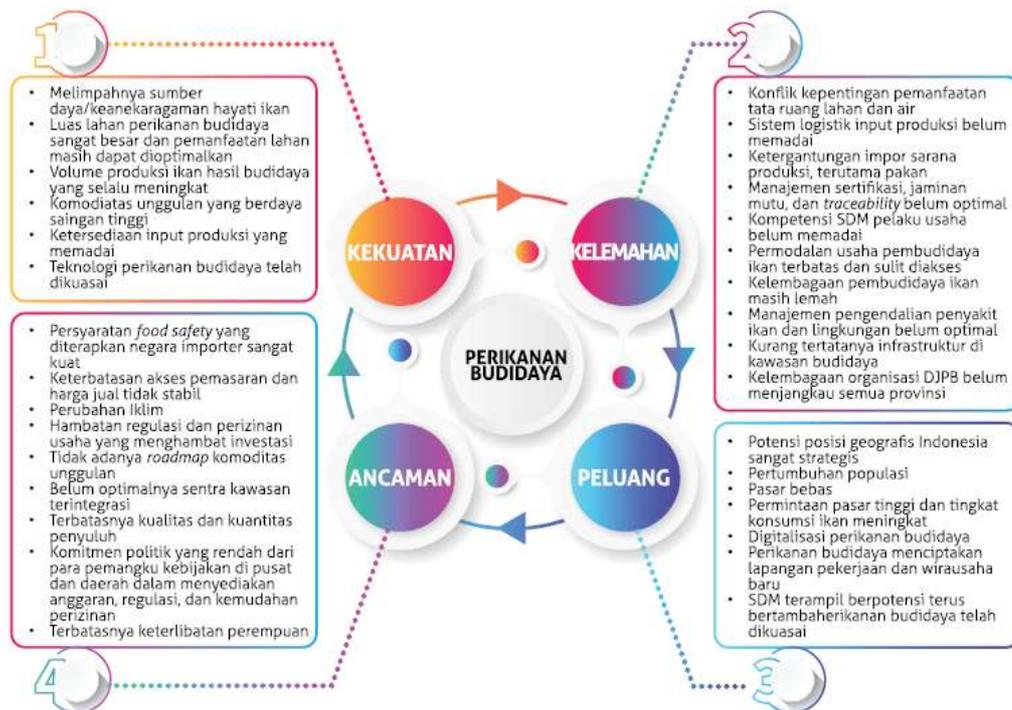
untuk beralih dari aktivitas *business-as-usual* menjadi aktivitas digitalisasi. Teknologi digital akan mengefisiensi mata rantai pasok industri perikanan dan pemberdayaan bagi pembudidaya kecil. Yang perlu diperkuat adalah kesiapan usaha budidaya skala kecil/menengah untuk adaptif terhadap *startup* aplikasi yang semakin dinamis.

6. Perikanan budidaya menciptakan lapangan pekerjaan dan kewirausahaan baru. Kondisi eksisting Rumah Tangga Perikanan berjumlah 1,68 juta RTP (KUSUKA 2019). Dengan karakteristik kerakyatan dan mudah diaplikasikan, perikanan budidaya berpotensi mampu menyerap tenaga kerja. Bonus demografi dengan banyaknya populasi kaum pemuda adalah sumber *entrepreneur* serta tenaga kerja di masa datang, sehingga perlu dipersiapkan untuk berpartisipasi dan memberikan sumbangan yang nyata kepada pembangunan ekonomi nasional. Semakin banyak wirausahawan muda yang memulai bisnis di sektor budidaya ikan, maka semakin banyak pula terobosan baru yang menjadikan sektor ini lebih maju.
7. SDM terampil berpotensi terus bertambah, ditandai dengan meningkatnya jumlah sekolah menengah dan perguruan tinggi yang memiliki program studi / jurusan perikanan budidaya. Saat ini, terdapat 45 Perguruan Tinggi (Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik yang memiliki Fakultas Perikanan (Quiper Campus 2019) dan menghasilkan lulusan terampil dan handal yang dapat bersaing di era digital.

Adapun lingkungan strategis yang menjadi tantangan bagi perikanan budidaya Indonesia, diantaranya:

1. Penetapan persyaratan oleh negara-negara importir bagi produk pangan yang masuk ke negaranya, antara lain bebas residu antibiotik, bakteri dan bahan kimia berbahaya lain, ketelusuran (*traceability*), dan sertifikasi.
2. Sebagian besar ekspor perikanan budidaya (ikan dan rumput laut) masih dalam bentuk *fresh*/bahan baku dan bukan dalam bentuk olahan sehingga nilai tambah yang diperoleh dari aktivitas perikanan budidaya masih sangat kecil.
3. Perubahan iklim, yang mengakibatkan siklus musim tidak menentu sehingga perubahan pola tanam dan masa pemeliharaan yang semakin lama; perubahan suhu permukaan air menyebabkan blooming alga, penurunan DO, dan peningkatan kejadian penyakit; kekeringan menyebabkan kurangnya kadar oksigen dan perubahan salinitas sehingga banyak kasus kematian ikan; dan hujan terus-menerus menyebabkan kenaikan permukaan air, *upwelling*, banjir, kehilangan area pelindung.

4. Kerentanan ekonomi global dan nasional terhadap kejadian luar biasa yang melanda dunia internasional, seperti pandemi virus Covid-19 yang berdampak negatif bagi keberlangsungan dunia usaha, termasuk perikanan budidaya.
5. Regulasi lintas sektor masih lemah dan asimetris, baik *inter* maupun *intra* sektoral, serta perizinan usaha yang cenderung menghambat usaha perikanan budidaya sehingga belum menjamin keamanan investasi untuk pengembangan usaha perikanan budidaya di Indonesia. Selain itu, pengaturan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dalam tata kelola perikanan budidaya belum optimal.
6. Belum optimalnya sentra/kawasan perikanan budidaya yang terintegrasi, sehingga aktivitas hulu dan hilir perikanan budidaya belum sejalan
7. Ketersediaan penyuluh yang masih kurang merata di berbagai wilayah serta terbatasnya kompetensi penyuluh sehingga pembudidaya belum mendapatkan pemahaman untuk mengaplikasikan teknologi inovatif terbaru.
8. Komitmen politik yang rendah dari para pemangku kebijakan dalam bentuk kurangnya dukungan anggaran, regulasi, dan kemudahan perizinan.
9. Keterlibatan perempuan dalam aktivitas perikanan budidaya masih terbatas (paruh waktu dan berpenghasilan rendah), serta besarnya peran pria dalam menentukan aktivitas perempuan dalam keluarganya.



Gambar 1. Potensi, Permasalahan, Peluang, dan Tantangan Perikanan Budidaya

(Sumber : Renstra DJPB 2020-2024)

## **BAB II** **VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS**

### **2.1 Visi**

Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Sedangkan Visi KKP 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”.

Visi Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya 2020-2024 sejalan dengan Visi Presiden dan

Wakil Presiden serta visi KKP yaitu “Terwujudnya masyarakat perikanan budidaya yang sejahtera dan sumber daya perikanan budidaya yang berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong.

### **2.2 Misi**

KKP menjalankan 4 (empat) dari 9 (sembilan) Misi Presiden, yaitu:

1. Misi ke-1: Peningkatan kualitas manusia Indonesia melalui peningkatan daya saing SDM dan pengembangan inovasi dan riset kelautan dan perikanan;
2. Misi ke-2: Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing melalui peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional;
3. Misi ke-4: Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan; dan
4. Misi ke-8: Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya melalui peningkatan tata kelola pemerintahan di KKP.

Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya menjalankan Misi ke-2, yaitu “Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing melalui peningkatan kontribusi ekonomi subsector perikanan budidaya terhadap perekonomian sektor perikanan nasional”. Misi utama DJPB diatas didukung dengan Misi ke-8, yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih

efektif dan terpercaya melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik yang dilakukan oleh seluruh unit kerja DJPB di pusat dan daerah.

## 2.3 Tujuan

Dalam merealisasikan Tujuan Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok dalam pembangunan perikanan budidaya adalah:

1. Meningkatnya kontribusi ekonomi subsektor Perikanan Budidaya Laut terhadap perekonomian sektor perikanan nasional.
  - a. Optimalnya pengelolaan kawasan perikanan budidaya yang berkelanjutan .
  - b. Meningkatnya produksi perikanan budidaya secara berkelanjutan.
2. Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik di UPT BPBL Lombok, yakni meningkatkan kinerja reformasi Birokrasi sebagai UPT Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya

## 2.4 SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis pembangunan Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok berdasarkan tujuan yang akan dicapai dijabarkan dalam empat Sasaran Strategis dengan masing-masing IKU sebagai berikut:

### 1. Ekonomi Sektor Perikanan budidaya BPBL Lombok meningkat

Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah :

- 1.1 Nilai PNBK Lingkup BPBL Lombok

### 2. Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya BPBL Lombok

Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah :

- 2.1 Jumlah Tenaga Teknis Binaan Lingkup BPBL Lombok.
- 2.2 Jumlah Bantuan Benih ikan Laut Lingkup BPBL Lombok yang tepat sasaran.
- 2.3 Jumlah Bantuan Sarana dan prasarana percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya
- 2.4 Jumlah Bantuan sarana dan prasarana perikanan budidaya dan percontohan perbenihan ikan.
- 2.5 Jumlah bibit rumput laut yang diserahkan ke masyarakat tepat sasaran.
- 2.6 Jumlah produksi induk/calon induk unggul yang dihasilkan BPBL Lombok.

2.7 Jumlah Hasil perekayasaan teknologi terapan bidang budidaya laut lingkup BPBL Lombok.

2.8 Meningkatnya Kapasitas sarpras Pembenihan”Lingkup BPBL Lombok (%).

### **3. Terselenggaranya Pengendalian dan pengawasan Sumberdaya Perikanan Budidaya BPBL Lombok yang partisipatif.**

Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah :

3.1 Jumlah layanan sampel yang diuji dalam rangka pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Lingkup BPBL Lombok yang sesuai standar.

### **4. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan BPBL Lombok yang efektif dan efisien dan berorientasi pada layanan prima**

Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah :

4.1 Indeks profesionalitas ASN Lingkup BPBL Lombok.

4.2 Prosentase penyelesaian LHP BPK satker BPBL Lombok.

4.3 Nilai rekon kinerja BPBL Lombok.

4.4 Prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang di manfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPBL Lombok.

4.5 Prosentase unit kerja yang menerapkan system manajemen pengetahuan yang terstandar.

4.6 Nilai IKPA BPBL Lombok.

4.7 Nilai NKA BPBL Lombok.

### **BAB III**

## **ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

### **3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Arah kebijakan Ditjen Perikanan Budidaya adalah “Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya yang Berkelanjutan”, dengan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan, ekonomi, dan sosial, pada periode 2020-2024. Selanjutnya arah kebijakan pembangunan perikanan budidaya dilakukan dengan mempertimbangkan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial.

Fokus pembangunan perikanan budidaya bertumpu pada 4 aspek, yaitu: (i) teknologi produksi, melalui inovasi teknologi untuk meningkatkan nilai produksi dan nilai tambah; (ii) sosial ekonomi, melalui keterlibatan semua stakeholder dalam peningkatan kesejahteraan pelaku usaha; (iii) keberlanjutan lingkungan, melalui aktivitas perikanan budidaya ramah lingkungan yang mempertimbangkan daya dukung lingkungan; (iv) berorientasi pasar, artinya perikanan budidaya memproduksi komoditas unggulan yang berorientasi pada permintaan pasar. Pada akhirnya, pembangunan perikanan budidaya diharapkan dapat berperan penting untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan, memenuhi ketahanan pangan nasional, dan peningkatan ekspor produk.

Kebijakan pembangunan perikanan budidaya dikelompokkan menjadi tiga kelompok strategi, meliputi Pengelolaan Kawasan Berkelanjutan, Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya, dan Peningkatan Kesejahteraan Pembudidaya Ikan.

Berdasarkan hal tersebut maka sasaran dan kebijakan yang dilakukan oleh BPBL Lombok adalah menjadi ujung tombak dan meneruskan arah kebijakan Ditjen Perikanan Budidaya 2020-2024 disesuaikan dengan lingkup dan tupoksi BPBL Lombok sebagai berikut :

1. Mewujudkan produk perikanan budidaya laut yang berdaya saing melalui produksi benih bermutu dan produksi calon induk/induk unggul dari komoditas budidaya laut lombok
2. Mewujudkan kemandirian perikanan pembudidaya melalui pemanfaatan sumberdaya berbasis pengawasan perikanan budidaya dan pemberdayaan kelompok pembudidaya ikan.
3. Monitoring sumberdaya perikanan budidaya secara berkelanjutan melalui pengendalian hama dan penyakit ikan.

Selanjutnya arah kebijakan tersebut dirumuskan dalam rencana aksi dan implementasi dengan output dan outcome yang terukur dan akuntabel sebagai berikut :

- a. Mewujudkan kesejahteraan pembudidaya melalui bantuan benih kepada masyarakat

pembudidaya ikan dan kebun bibit rumput laut.

- b. Mewujudkan produk perikanan budidaya dengan meningkatkan produksi benih bermutu, calon induk/induk unggul dari berbagai komoditas yang dikembangkan meliputi spat tiram mutiara, abalon, bawal bintang, kakap putih, rumput laut, dan ikan hias *clown fish*.
- c. Mewujudkan keberlanjutan perikanan budidaya laut dengan mengembangkan teknologi budidaya laut dalam berbagai kegiatan perekayasaan.
- d. Mewujudkan kemandirian pelaku usaha budidaya laut melalui kegiatan pengawasan perikanan budidaya dan pemberdayaan kelompok pembudidaya
- e. Mewujudkan keberlanjutan usaha budidaya melalui kegiatan pengujian dan pengendalian hama penyakit ikan dan monitoring residu.

### **3.2 STRATEGI**

Strategi yang ditempuh BPBL Lombok adalah dengan berkontribusi langsung mengambil bagian sesuai dengan tupoksi nya untuk mewujudkan arah kebijakan pembangunan perikanan budidaya tahun 2020-2025 adalah dengan mengimplementasikan kegiatan-kegiatan prioritas DJPB sebagai berikut :

- a. Aspek sosial ekonomi:

Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya, dilaksanakan dengan komponen kegiatan prioritas sebagai berikut:

- Penyaluran bantuan induk unggul dan benih bermutu kepada kelompok pembudidaya untukmenghidupkan kembali usaha budidaya skala kecil, serta mengoptimalkan fungsi

UPT dan UPTD serta unit pembenihan masyarakat untuk membantu kontinuitas usaha kelompok penerima bantuan tersebut,

- Penyaluran bantuan sarana dan prasarana kepada kelompok pembudidaya, antara lain bibit/benih, pakan, obat ikan dan vitamin, pupuk serta peralatan, sebagai upaya stimulasi pengembangan usaha pembudidayaan ikan.
- Pengembangan kebun bibit rumput laut melalui pemberian bantuan bibit bermutu di kawasan sentra kebun bibit rumput laut.

b. Aspek teknologi produksi:

Meningkatkan produktivitas, daya saing ekonomi serta pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan budidaya, dilaksanakan dengan komponen kegiatan prioritas sebagai berikut:

- Pengembangan kawasan perikanan budidaya (minapolitan) dengan mengintegrasikan rantai produksi dari hulu sampai hilir untuk efisiensi produksi;
- Peningkatan kualitas induk dan benih melalui sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) untuk menghasilkan unit pembenihan bersertifikat;
- Pelaksanaan sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) untuk menghasilkan pembudidaya (pembesaran ikan) bersertifikat;
- Pengembangan Kebun Bibit Rumput Laut dengan sistem Kultur Jaringan
- Peningkatan kuantitas dan kualitas ikan non konsumsi (ikan hias, karang buatan, tanaman hias dll);
- Pengembangan sentra budidaya baru berbasis kawasan/klaster, dimana salah satu gebrakan KKP adalah pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di pulau-pulau terluar Indonesia. Dalam hal ini, Ditjen Perikanan Budidaya ditugaskan untuk mengawal 3 kawasan SKPT, yaitu Sabang, Rote Ndao, dan Sumba Timur.
- Pelaksanaan budidaya lele sistem bioflok, yaitu teknologi budidaya lele intensif dengan mengandalkan suplai oksigen dan gumpalan (flok) mikroorganisme tertentu. Untuk tahap awal, fokus kegiatan bioflok dilakukan di pesantren, untuk kemudian diperluas ke wilayah lain. Tujuan bioflok adalah meningkatkan ketahanan pangan, memenuhi gizi protein santri, meningkatkan konsumsi makan ikan masyarakat, meningkatkan pendapatan serta perekonomian pesantren dan masyarakat
- Pengembangan sarana input produksi inovatif di UPT Pusat, misalnya protein rekombinan, vaksin, enzim, probiotik, immunostimulan, rekayasa genetik, automatic feeder, karamba bulat, dll.

c. Aspek sumber daya alam dan lingkungan:

Mewujudkan kelestarian dan keberlanjutan dalam pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya., dilaksanakan dengan komponen kegiatan prioritas sebagai berikut:

- Penerapan perekayasa teknologi budidaya yang efisien dan ramah lingkungan dan sesuai dengan daya dukung;
- Pengembangan *Culture Based Fisheries (CBF)* dengan pendekatan komoditas *multitrophic level*.
- Pengembangan komoditas ikan spesifik lokal unggulan dan species ikan tahan perubahan lingkungan;
- Pengendalian plasma nutfah induk dan benih;

### 3.3 KERANGKA REGULASI

BPBL Lombok merujuk pada kerangka regulasi yang telah ada dalam rangka penyelenggaraan tatakelola pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan arah kebijakan dan strategi pembangunan perikanan budidaya periode 2020-2024 diperlukan.

Beberapa kerangka regulasi tersebut antara lain:

Dalam Rencana Strategis DJPB Tahun 2020-2024, kerangka regulasi akan disiapkan mengacu padaprogram legislasi nasional meliputi:

1. **Rancangan Undang-Undang (RUU)**, yaitu RUU tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam. RUU tentang Perubahan atas UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

2. **Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)**, yaitu RPP tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan dan RPP tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren yang merupakan amanat dari UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

3. **Rancangan Peraturan Presiden (Rperpres)**, yaitu RPerpres tentang Rencana Aksi Undang Nasional

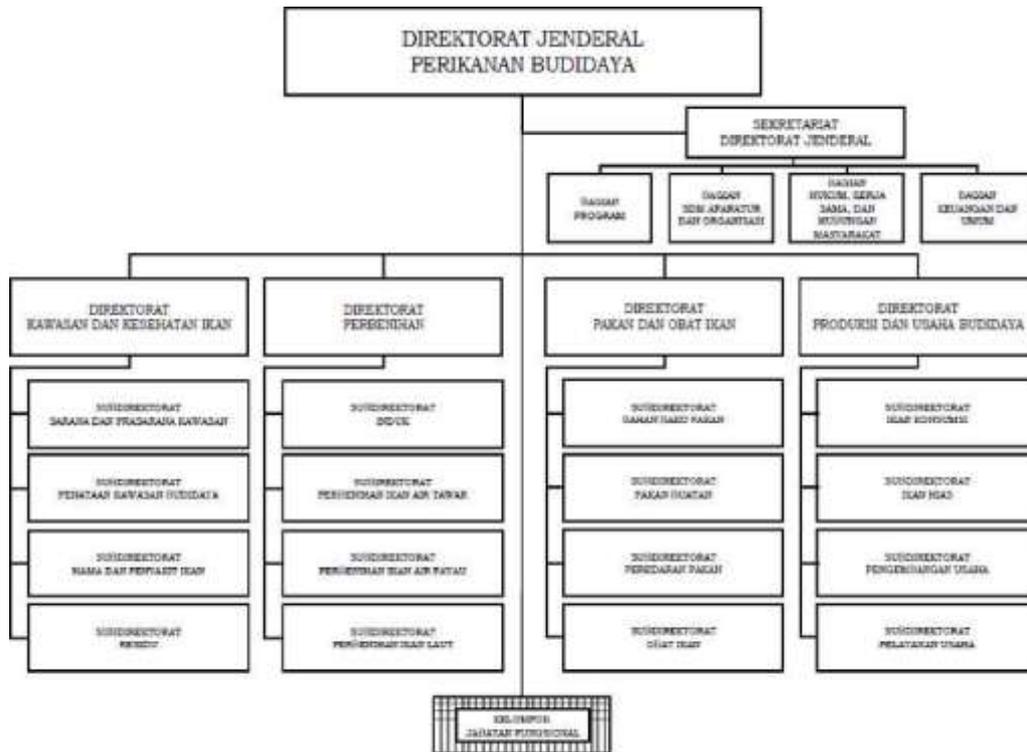
4. **Rancangan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri KP (R. Permen dan Kepmen KP)**, yaitu

- (a) Rancangan Permen Tata Cara Penyusunan Rencana Pemanfaatan Air dan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan,
- (b) Rancangan Permen Potensi dan Alokasi Lahan Pembudidayaan Ikan di Wilayah Pengelolaan RI,
- (c) Rancangan Permen KP Tata Cara Penyusunan Rencana Pemanfaatan Air dan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan,
- (d) Rancangan Permen tentang Rekomendasi Pengeluaran Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan, (e) Rancangan Permen KP Penggunaan Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan,
- (f) Rancangan Permen Sistem Perbenihan Nasional,
- (g) Revisi KEP.33/MEN/2007 Tentang Penetapan Jenis-jenis Penyakit Ikan Yang Berpotensi Menjadi Wabah Penyakit Ikan,
- (h) Revisi Permen Nomor 6/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Tawar, Perikanan Budidaya Air Payau, dan Perikanan Budidaya Laut,
- (i) Rancangan Permen Pengendalian Resistensi Antimikrobia,
- (j) Rancangan Permen Kriteria Teknis Zona Perikanan Budidaya,
- (k) Rancangan Permen Kawasan Budidaya,
- (l) Rancangan Kepmen Jenis Ikan Berbahaya dan Ikan Merugikan,
- (m) Revisi Permen KP No. 1 Tahun 2019 Obat Ikan,
- (n) revisi Permen KP nomor 55 tahun 2018 tentang pakan ikan,
- (o) Revisi Permen 56 Tahun 2018 Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk ikan, dan/atau inti mutiara,
- (p) R.Permen Kesejahteraan Ikan,
- (q) R.Permen Tata Cara Kriteria Penetapan Kawasan Budidaya,
- (r) Revisi Permen KP Nomor 49/MEN/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan
- (s) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup,
- (t) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21/PERMEN-KP/2014, tentang larangan pengeluaran ikan hias anak ikan arwana, benih ikan botia hidup dan ikan botia hidup dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia.

### 3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Perpres

Nomor 63 tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP telah melakukan pnaatan kelembagaan (re-organisasi) untuk mengefisiensikan dan mengoptimalkan fungsinya. Ini diperkuat dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, dimana Ditjen Perikanan Budidaya melakukan penyesuaian struktur organisasi sebagai berikut:



Gambar 2. Struktur Organisasi DJPB

Organisasi BPBL Lombok disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 6/PERMEN-KP/2014 tanggal 03 Februari 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Tawar, Perikanan Budidaya Air Payau, dan Perikanan Budidaya Laut, BPBL Lombok mempunyai tugas untuk melaksanakan uji terap teknik dan kerjasama, produksi, pengujian laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan, serta bimbingan teknis perikanan budidaya laut.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana kegiatan teknis dan anggaran, pemantauan dan evaluasi serta laporan;
2. Pelaksanaan uji terap teknik perikanan budidaya laut;
3. Pelaksanaan penyiapan bahan standardisasi perikanan budidaya laut;
4. Pelaksanaan sertifikasi sistem perikanan budidaya laut;
5. Pelaksanaan kerja sama teknis perikanan budidaya laut;

6. Pengelolaan dan pelayanan sistem informasi dan publikasi perikanan budidaya laut;
7. Pelaksanaan layanan pengujian laboratorium persyaratan kelayakan teknis perikanan budidaya laut;
8. Pelaksanaan pengujian kesehatan ikan dan lingkungan budidaya laut;
9. Pelaksanaan produksi induk unggul, benih bermutu, dan sarana produksi perikanan budidaya laut;
10. Pelaksanaan bimbingan teknis perikanan budidaya laut; dan
11. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut, struktur organisasi dan tata kerja Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok terdiri dari :

1. Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas untuk melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaporan keuangan, kegiatan teknis, anggaran, pengelolaan kepegawaian, tata laksana, barang milik negara, rumah tangga, dan ketatausahaan.
2. Seksi Pengujian dan Dukungan Teknis, mempunyai tugas untuk melakukan penyiapan bahan pelaksanaan layanan pengujian laboratorium persyaratan kelayakan teknis, kesehatan ikan dan lingkungan, produksi induk induk unggul, benih bermutu, dan sarana produksi, serta bimbingan teknis perikanan budidaya laut.
3. Seksi Uji Terap Teknik dan Kerjasama, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan uji terap teknik, standardisasi, sertifikasi, kerja sama teknis, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, serta publikasi perikanan budidaya laut.
4. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perekayasaan, pengujian, penerapan dan bimbingan penerapan standar/sertifikasi perbenihan dan pembudidayaan laut, pengendalian hama dan penyakit ikan, pengawasan benih dan pembudidayaan, dan penyuluhan serta kegiatan lain sesuai tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. Jabatan Fungsional yang ada di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok : Perekayasa, Pengawas Perikanan, Teknisi Litkayasa dan Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan.



**Gambar 3.** Struktur Organisasi BPBL Lombok

**BAB IV**  
**INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

**4.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Untuk mengukur dan mengevaluasi hasil pembangunan perikanan budidaya laut selama periode 2020 - 2024, Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok telah merumuskan dan menetapkan target indikator dan sasaran strategis 2020 - 2024, sebagai target kondisi yang ingin dicapai secara nyata serta mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/impact*), dari satu atau beberapa kegiatan yang dilaksanakan DJPB. Adapun Indikator Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program/Utama, serta Indikator Kinerja Kegiatan BPBL Lombok adalah sebagai berikut:

Tabel 1 : Indikator Kinerja BPBL Lombok Tahunan 2020-2024

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET TAHUNAN				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Ekonomi sektor perikanan budidaya BPBL Lombok Meningkat	1	Nilai PNBP BPBL Lombok (Rp)	637,780,000	680,000,000	730,000,000	780,000,000	830,000,000
2	Peningkatan produksi perikanan BPBL Lombok	2	Jumlah Tenaga teknis binaan lingkup BPBL Lombok (orang)	230	250	270	290	320
		3	Jumlah Bantuan benih ikan laut Lingkup BPBL Lombok yang tepat sasaran (ekor)	749,000	760,000	780,000	800,000	820,000
		4	Jumlah Bantuan sarana prasarana percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya (paket)	11	15	15	15	15
		5	Jumlah Bantuan sarana prasarana perikanan budidaya dan percontahaan perbenihan ikan (paket)	1	20	20	20	20

		6	Jumlah Bibit Rumput Laut Yang Diserahkan ke Masyarakat yang Tepat Sasaran (kg)	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>
		7	Jumlah produksi Induk/Calon Induk Unggul yang dihasilkan BPBL Lombok (ekor)	<b>3,600</b>	<b>3,600</b>	<b>3,600</b>	<b>3,600</b>	<b>3,600</b>
		8	Jumlah Hasil perekayasaan teknologi terapan bidang budidaya Lingkup BPBL Lombok (paket teknologi)	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
		9	Meningkatkan Kapasitas Sarpras Perbenihan "Lingkup BPBL Lombok (%)	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
3	Terselenggaranya Tata Kelola Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Budidaya Lingkup BPBL Lombok Yang Partisipatif	10	Jumlah layanan sampel yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan BPBL Lombok sesuai standar (sampel)	<b>2,000</b>	<b>2,200</b>	<b>2,400</b>	<b>2,500</b>	<b>2,600</b>
4	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan BPBL Lombok yang efisien dan berorientasi pada layanan Prima	11	Indeks profesionalitas ASN lingkup BPBL Lombok	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>72</b>
		12	Prosentase penyelesaian LHP BPK satker BPBL Lombok (%)	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
		13	Nilai Rekon Kinerja BPBL Lombok	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
		14	Prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang di manfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPBL Lombok (%)	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>

	15	Prosesntase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang tersetandar (%)	82	82	82	82	82
	16	Nilai IKPA BPBL Lombok	88	88	88	88	88
	17	Nilai NKA BPBL Lombok	85	85	85	85	85

#### 4.2 KERANGKA PENDANAAN

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi dan kegiatan pembangunan perikanan budidaya laut Lombok menuju tercapainya sasaran target dan indikator kinerja sebagaimana telah dirumuskan sebelumnya, diperlukan kerangka pendanaan / pembiayaan yang memadai guna tercapainya target tersebut. Anggaran yang diperlukan untuk pembangunan perikanan budidaya laut Lombok , idealnya merupakan sinergitas dari berbagai sumber pembiayaan ABPN termasuk PNBP, hibah luar negeri serta masyarakat. Sinergitas berbagai sumber pembiayaan sangat diperlukan mengingat peran pemerintah yang dibatasi oleh ketersediaan anggaran, tugas serta kewenangan. Dana APBN hanya bersifat stimulus yang difokuskan untuk kegiatan pokok yang menjadi kewenangan pusat melalui unit pelaksana teknis yang ada.

## BAB V. PENUTUP

Rancangan Teknokratik Rencana Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan 5 tahun, yang disusun untuk menjabarkan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Rancangan Teknokratik Rencana Strategis Ditjen Perikanan Budidaya, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Rancangan Teknokratik Rencana Strategis BPBL Lombok tahun 2020-2024 akan terus disempurnakan bersamaan dengan proses penyusunan Rancangan Awal RPJMN Tahun 2020-2024 dan Rancangan Teknokratik Renstra DJPB hingga ditetapkannya Peraturan Dirjen Perikanan Budidaya tentang Rencana Strategis Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2020-2024.

Lombok Barat  
pada tanggal 4 September 2020

KEPALA BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK,



MULYANTO, ST. MSI

